

Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara yang sistem pemerintahan dikuasai oleh Junta Militer sejak kemerdekaan tahun 1948 dari jajahan Inggris. Berbagai pelanggaran telah dilakukan oleh Junta Militer terhadap rakyat Myanmar. Rakyat Myanmar menginginkan negara bebas dan demokrasi agar terlepas dari kekuasaan junta. Uni Eropa merupakan negara menjunjung nilai HAM dan Demokrasi, dengan melihat adanya tindakan kekerasan di Myanmar akhirnya menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar.

Pada tahun 2007 pemerintah junta militer, melakukan kekerasan terhadap demonstran melakukan penentangan terhadap kebijakan pemerintah yaitu kebijakan ekonomi ketat bulan Agustus 2007, di mana pemerintah menarik subsidi bahan bakar minyak. Dengan kenaikan harga subsidi yang diterapkan oleh pemerintah membuat rakyat untuk bergerak melawan junta militer. Selain melakukan kekerasan terhadap para demonstran, junta militer juga melakukan kekerasan terhadap suku minoritas yang ada di Myanmar, larangan terhadap pers dan media masa untuk meliput, penggunaan tentara anak dan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan politik lainnya. Dengan demikian perhatian dari 3 generasi yang memimpin Myanmar tidak membawa perubahan yang lebih baik. Janji militer untuk menjalankan demokrasi dan mengembalikan ke pemerintah sipil tidak dilakukan oleh junta.

Dalam upaya keluar dari sanksi Uni Eropa, Myanmar melakukan reformasi politik dengan mengadakan pemilu demokratis, pembebasan pers, dan pembebasan para tahanan politik, menjadi prasyarat untuk pencabutan sanksi dari Uni Eropa serta melakukan upaya dengan membujuk negara-negara penting Eropa, seperti Inggris, Prancis dan Jerman.

Dengan adanya tur Myanmar ke Uni Eropa yang dilakukan oleh Presiden Thein Sein merupakan keinginan pemerintah Burma untuk kembali terlibat dengan Uni Eropa dan negara anggotanya. Uni Eropa menyambut reformasi telah berkomitmen untuk membantu Myanmar dengan memberikan dana bantuan pada Negara Myanmar. Kenyataan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Myanmar untuk memenuhi kebutuhan Myanmar yaitu dengan keterlibatan langsung untuk mempromosikan hubungan yang baik dan melakukan kerjasama di antar ke 2 negara tersebut. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan dan keterlibatan Uni Eropa di Myanmar.